

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan salah satu cerminan atau komponen dari efektivitas entitas publik. Salah satu kota yang cukup baik dalam mengelola urusan pemerintahannya adalah Kota Surabaya. Meskipun demikian, Kota Surabaya terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahannya. Untuk mencapai kinerja tersebut diperlukan kejelasan dalam suatu anggaran, pegawai yang memiliki pengendalian akuntansi yang tinggi, dapat mengelola sistem pelaporan, berkemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, serta kompetensi yang baik.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi-instansi pemerintah diharuskan melaksanakan akuntabilitas kinerja. Bentuk pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya dengan membuat laporan kinerja yang dihasilkan dari sebuah sistem manajemen kinerja berupa sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah (Ramadhania, 2020).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Output yang dihasilkan dari SAKIP ini berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Berhasil

atau tidaknya pemerintah mencapai tujuan tergantung seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Mardiasmo (2018:78) terdapat 3 fungsi utama sektor publik :

1. Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum.
2. Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat.
3. Menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Untuk menentukan seberapa baik pemerintah menjalankan tugasnya, kinerja harus diukur. Kinerja keuangan atau non-keuangan dapat diukur ketika melakukan evaluasi kinerja. Kinerja non-keuangan dapat diukur dengan mengevaluasi sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuan, sedangkan kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode.

**Tabel 1.1**

**Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah  
(LHE-AKIP) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa  
Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, & Banten  
Pada Tahun 2020-2021**

No	Kategori	Nilai angka	Interpretasi	Jumlah Instansi	Presentase
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	4	2%
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan	87	45,50%
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	45	23,56%
4.	B	> 60 – 70	Baik	25	13,08%
5.	CC	> 50 – 60	Cukup	23	12,04%
6.	C	> 30 – 50	Kurang	7	3,60%
7.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	-	-
Jumlah				191	100%

Dalam berita yang bersumber dari [ro-organisasi.jatimprov.go.id](http://ro-organisasi.jatimprov.go.id), [opendata.jabarprov.go.id](http://opendata.jabarprov.go.id), [tangerangkab.go.id](http://tangerangkab.go.id), [nttprov.go.id](http://nttprov.go.id) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas sebagian kecil pemerintah daerah masih rendah, yaitu sekitar 15,64%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (LAN BPKP, 2004).

Fenomena lainnya adalah Indeks Reformasi Birokrasi pun rata-rata mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi pada lingkup kementerian dan Lembaga dari 73,91 di tahun 2019 menjadi 74,93 pada tahun 2020 serta pemerintah provinsi dari 64,23 di tahun 2019 menjadi 64,28. Semakin efektif, efisien, bersih, dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar masyarakat, maka semakin besar nilai RB organisasi tersebut ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)).

Namun ada beberapa keadaan yang masih rapuh diantaranya yaitu masih banyak regulasi daerah yang tengah tumpang tindih serta menyulitkan pembangunan daerah. Selain itu, sistem pengendalian internal belum mampu mencegah penyimpangan yang terjadi dan upaya penataan organisasi belum memberi petunjuk bahwasanya organisasi tetap pada ukuran yang tepat. Maka dari itu terjadilah pembentukan organisasi yang tidak efisien. Beberapa wilayah juga masih memiliki predikat cukup atau bahkan kurang, jadi peneliti ingin mengaplikasikan hal ini supaya predikat mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020 hingga 2021 memperlihatkan bahwa belum maksimalnya beberapa aparatur instansi dalam pencapaian kinerja masing-masing. Kompetensi penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu persoalan. Penganggaran merupakan suatu proses politik dalam organisasi sektor publik, dalam hal ini anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo 2002:61). Anggaran adalah gambaran kuantitatif dari tujuan manajemen dan sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi semua manajer pada unit organisasi di bawahnya, untuk mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi kinerja manager (Supriyono, 2006: 349).

Selain penganggaran terdapat pengendalian akuntansi. Dengan adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan menilai seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan instansi. Sistem akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. (Pratama et al., 2019).

Untuk memantau dan mengawasi kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pelaporan yang baik. efektivitas manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan dan umpan balik diperlukan untuk mengevaluasi tindakan yang diambil dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam menjalankan suatu rencana atau anggaran sehingga manajemen mengetahui hasil pelaksanaan anggaran atau pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan (Isnanto, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi juga diduga memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Hal terakhir yang mungkin memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kompetensi aparatur pemerintah. Spencer (1993:9) mendefinisikan kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan sebab akibat dengan standar yang dijadikan acuan di suatu tempat kerja atau situasi tertentu.

Dalam melaksanakan penekanan otonomi daerah di Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah, sebagai birokrasi daerah, harus mengambil peran yang lebih dominan. Tugas dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa batasan. Perangkat Daerah Kota Surabaya secara umum terdiri dari beberapa bagian yaitu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan. Dari beberapa bagian tersebut, peneliti mengambil Dinas Daerah sebagai obyek penelitian.

Menurut Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 7, Dinas Daerah bertugas mengelola kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka kelancaran kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di wilayah kecamatan, pada Dinas Daerah dibentuk unit pelaksana teknis dinas.

Berdasarkan penelitian Yulianto (2019), hasil pengujian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan penelitian Apriyanti

(2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi secara signifikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harianto (2021). Hasil studi yang dilakukan mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian Septiyani (2018) menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari fenomena dan penelitian sebelumnya peneliti menemukan masalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masih rendah dan tata kelola yang kurang baik. Menanggapi fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian guna menganalisis pengaruh keterkaitan antar variable dengan fenomena yang ada saat ini. Berdasarkan alasan diatas penelitian ini diberikan judul :

“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk menguji dan membuktikan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk menguji dan membuktikan Sistem berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Untuk menguji dan membuktikan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Untuk menguji dan membuktikan Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi  
Sebagai informasi atau bahan masukan bagaimana kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Universitas  
Memberikan penambahan penelitian ilmiah bagaimana kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi Peneliti  
Digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang sudah diterima selama perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan

mahasiswa S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jatim.

4. Bagi Pembaca

Menambah wawasan atau pengetahuan pembaca dan membantu pembaca untuk mencari referensi pada kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.